

7

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pemandangan Umum
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat
Rancangan Terhadap:
Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun 2011

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 Oktober 2011

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pemandangan umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2011.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Sumatera Barat

Sdr. Kepala Dinas, Badan, dan Kantor dilingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Ormas, Orsospol, Tokoh Masyarakat, wartawan Media
Cetak dan Elektronik, serta Hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu kami dari Fraksi PPP mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Terhadap ^{Rancangan} ~~Ranperda~~ tentang Perubahan APBD Tahun 2011.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Sebagai mana telah kita ikuti bersama pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2011 Saudara Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan nota pengantar Rancangan Perubahan APBD 2011. ~~Setelah kami Fraksi PPP melakukan pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2011 tersebut.~~

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati

Mencermati Rancangan ~~Peraturan Daerah tentang~~ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 ini, Anggaran pendapatan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp.1.986.576.067.525 mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp.84.585.128.316 atau 4,26% sehingga menjadi Rp.2.071.161.195.841

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada APBD awal sebesar Rp.1.086.756.029.022 mengalami peningkatan sebesar Rp.60.547.740.934 atau 5,57% sehingga menjadi sebesar Rp.1.147.303.769.956
- b. Dana perimbangan ditargetkan pada APBD awal sebesar Rp.894.605.038.503 mengalami peningkatan sebesar Rp.3.035.840.000 atau 0,34% sehingga menjadi sebesar Rp.897.640.878.503,-
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah yang ditargetkan pada APBD awal sebesar Rp.82.057.646.522 mengalami peningkatan sebesar Rp.18.511.860.122 atau 22,56% sehingga menjadi sebesar Rp.100.569.506.644,-

Anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp.2.328.765.073.501,14,- tersebut diatas direncanakan dialokasiakan untuk:

- a. Belanja tindak langsung yang semula dianggarkan sebesar Rp1.117.210.212.935,- mengalami penambahan sebesar Rp.35.106.258.197,14 atau 3,14% sehingga menjadi sebesar Rp.1.152.316.471.132,14,-
- b. Belanja langsung yang semula dianggarkan sebesar Rp.1.006.471.448.583,- mengalami peningkatan sebesar Rp.169.977.153.786 atau 16,89% sehingga menjadi sebesar Rp.1.176.448.602.369,-.

Ada beberapa segmentasi yang kita perlu melakukan pendalaman, sebelum penambahan pendapatan dan penambahan belanja ini berkenankan lah kami mengomentari nota keuangan dan nota panganntar Saudara Gubernur tentang rancangan Perubahan APBD 2011 ini.

Dimana pada capaian target kinerja dapat digambarkan melalui tujuh anggeda pembangunan RPJMD pada bagian :

Ada beberapa segmentasi yg perlu dilakukan pendalaman

Saudara Gubernur telah menyampaikan keberhasilan secara spektakuler yang sangat menyenangkan kita semua pada poin pertama ini yang di elaborasi adalah diluar RPJMD 2010-2015, dalam hal ini kami mohon penjelasan bagaimana sebenarnya konjuntur keberhasilan yang telah dicapai kisaran tahun 2010 dan 2014 ini.

Bagaimana hasil pembangunan kita bila dikaitkan dengan keberhasilan pembangunan bidang spiritual dan moral ~~menyangkut dengan~~ berbagai kasus telah terjadi di Sumatera Barat belakangan ini, ~~Fraksi kami~~ ~~mengenal~~ tinggi nya tingkat berkembang penyakit masyarakat, kami ~~berkesimpulan bahwa~~ untuk menyikapi dan mengantisipasi ~~pergaulan bebas~~ ^{hal tsb diatas} perlu diadakan suatu kajian yang terukur untuk membentengi anak kemenakan kita dari carut marut pergaulan bebas dan perbuatan asusila yang telah menjurus kepada praktek jahiliyah yang menjijikan.

Melihat situasi dan kondisi seperti diatas, seperti nya kita sudah gagal dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya serta membangun sumber daya manusia berkualitas yang bermoral.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati

tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar yang telah diuraikan menurut kami pertumbuhan ekonomi tersebut tidak pada tahun yang berjalan, karena kami lihat hal tersebut perpedoman pada data tahun 2009, tidak sesuai dengan tahun berlakunya APBD yang bersangkutan.

Juga kami ingin penjelasan bagaimana sebenarnya pertumbuhan ekonomi selama tahun Anggaran ini, karena angka-angka yang telah terpapar ini akan mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat kita yang sebenarnya.

~~Sudah barang~~ tentu hal ini memerlukan penjelasan dan angka konkrit pertumbuhan ekonomi peningkatan pendapatan perkapita, begitu pula pemerataan pendapatan, sama sebangun dengan pemerataan yang terjadi di perkotaan ~~sampai~~ ^{dan} di pedesaan. Begitu pula dengan menurunnya angka penduduk miskin, menurunnya angka pengangguran terbuka, dan menurunnya angka setengah menganggur sampai tahun 2011 ini.

Rancangan Perubahan APBD th 2011 ini
Sepertinya hanya setengah hati
mengentaskan persoalan tsb.

Kemudian mengenai infestasi yang benar-benar ada di daerah kita dimana dan apa program yang telah di introdusir dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, fraksi ppp perlu penjelasan untuk kepastian kebijakan standar untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik, untuk masa-masa yang akan datang, semoga hal ini akan menjadi perhatian yang sungguh-sungguh bagi Saudara Gubernur ~~dalam~~ dan memberikan penjelasan yang terukur tentang hal ini.

Selanjutnya kami ingin ~~menambahkan~~ ^{mendapatkan} penjelasan ~~selanjutnya~~ bahwa dalam belanja langsung dianggarkan untuk urusan wajib terdapat penurunan di beberapa urusan antara lain ~~terdapat~~ pada urusan perpustakaan, sebagai mana kita ketahui perpustakaan adalah sangat perlu diperhatikan sebagai jantung proses belajar mengajar masyarakat, yang pada awalnya dianggarkan Rp.3.832.524.900 mengalami penurunan sebesar 37.98% ~~dan~~ ^{menjadi} diperkecil lagi, akhirnya menjadi sebesar Rp. 2.376.755.400,-.

Kalau begini perhatian kita terhadap perpustakaan sebagai penunjang teknis pendidikan yang keberhasilannya selama ini jauh dari yang kita harapkan, ~~apabila penurunan ini terjadi~~ ^{Dan sekarang ini pendanaannya turun} secara signifikan, tentu akan semakin tidak dapat kita harapkan ~~perpustakaan, mohon penjelasan~~, dan harapan kami untuk masa yang akan datang sangat perlu ditingkatkan kalau kita ingin sumber daya manusia kita berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Urusan pariwisata yang semula dianggarkan sebesar Rp.5.935.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.147.261.440 atau 2,48%, dalam kondisi menurunnya kondisi pariwisata di Sumatera Barat sebagai salah satu tujuan wisata di tanah air dalam hal ini kami pertanyakan, ~~apa sebab-sebab penurunan anggaran dalam urusan ini.~~

Pertanyaan kami apakah penurunan Anggaran ini tidak mengurangi keseriusan Sumatera Barat terhadap program menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu tujuan wisata di tanah Air k

Selanjutnya kami juga mengharapkan
Saudara Gubernur dapat memberikan
penjelasan yg meyakinkan
bahwa terjadinya penambahan dan
pengurangan Anggaran pada SKPD
bukan karena Alasan Suka atau tidak
Suka tetapi, Apakah hal yg
Demikian sudah merupakan
kebijakan yang terfank 4/ ~~mesyarakat~~
Sumatera Barat yang sesuai dan
juga menunjang visi misi Gubernur
yg tertuang dalam RPJMD.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap APBD
Perubahan Tahun 2011. Atas perhatian nya Kami ucapkan terima kasih.

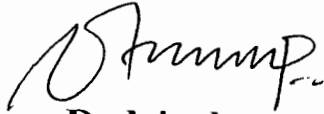
Billahit taufik wal hidayah

وَلَسْتَ عَلَىٰ كُرْهُكَ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ

Padang, 13 Oktober 2011

Fraksi PPP
DPRD Propinsi Sumatera Barat

Ketua



Dedrizal

Sekretaris

Drs. H. Mazwar Mas'ud

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Forum Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/Asisten/ Kepala Dinas Badan/

Kantor Wilayah/ dan Lembaga Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir.

Yth.Sdr. Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011.

Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mewariskan untuk kita pedoman yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Sdr. Pimpinan DPRD, Gubernur , MUSPIDA, serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan.

Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Sidang, Pimpinan Dewan dan Sdr.Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 .

Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.

Setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011, kami **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan beberapa pendapat dan mohon penjelasan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

Pada tanggal 11 Oktober 2011 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat Sdr.Gubernur telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 bahwa Pendapatan Daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp. 1.986.576.067.525,- bertambah sebesar Rp. 84.585.128.316,- atau 4,26 % sehingga menjadi Rp. 2.071.161.195.84,- yang terdiridari :

1. Pendapatan Asli Daerah ditarget sebesar Rp.1.086.756.029.022,- bertambah sebesar Rp.60.547.740.934,- atau 5,57% sehingga menjadi Rp.1.147.303.769.956,- antara lain berasal dari :
 - a. Pajak Daerah yang direncanakan kenaikan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor kami **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat untuk meningkatkan PKB dan BBNKB tersebut dapat dilakukan namun Pemerintah Daerah harus memiliki data yang akurat atau data base tentang jumlah kendaraan bermotor baru atau lama secara lengkap sehingga dapat dihitung secara jelas karena data tersebut sepertinya tidak dipergunakan secara baik oleh Pemerintah Daerah sehingga kenaikan tidak dapat diprediksi dengan baik, untuk itu mohon penjelasan mengapa demikian. Disamping peningkatan pajak Daerah dari PKB dan BBNKB tersebut terdapat beberapa kendaraan dinas yang dilakukan pelelangan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan pengadaan kendaraan Dinas baru sebagai pengganti kendaraan yang dilelang tersebut.

- b. Kami **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan kenapa pendapatan daerah dari Pajak Air Permukaan dari PLN yang masih 41,54 % dan hanya diperkirakan akan dicapai sampai akhir tahun sebesar Rp. 6.230.623.200,- atau 62,30 % sedangkan potensi yang tersedia masih ada.
- c. Kenapa Pemerintah Daerah tidak merencanakan peningkatan pendapatan yang berasal dari PT Semen Padang dalam rancangan Perubahan APBD tahun 2011 sedangkan pada 12 juli 2011 telah ada kesediaan PT Semen Padang untuk meningkatkan sumbangannya, begitu juga sumbangan dari PT.Pelindo yang masih direncanakan sebesar Rp.125.000.000,-dan tidak ada peningkatan. *Mohon penjelasan.*
- d. Penerimaan dari hasil Kekayaan yang dipisahkan antara lain direncanakan berasal dari PT.ATS sebesar Rp.50.000.000,- semula Rp.129.907.000,- terjadi penurunan sebesar Rp.79.907.000,- PT Grafika sebesar Rp.50,000.000,- dari Rp.500.000.000,- terjadi penurunan sebesar Rp.450.000.000,-dan PT.Dinamika sebesar Rp.50.000.000,- dari Rp.192.000.000,- terjadi penurunan sebesar Rp.142.000.000,- sehingga dalam rencana APBD Perubahan tahun 2011 tidak lagi disediakan dana untuk perusahaan Daerah tersebut kami **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan Kebijaksanaan Pemerintah Daerah tersebut sedangkan pergantian Direksi telah dilakukan dengan harapan kontribusi dari Perusahaan Daerah tersebut dapat ditingkatkan. Dari Kebijaksanaan tersebut kami berpendapat kurangnya kepedulian dan keseriusan Pemerintah Daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah,

Sebaiknya Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi dan pengkajian terhadap BUMD tersebut kalau harus di Eliminasi atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga segera dilakukan, sehingga dapat memotifasi BUMD tersebut untuk lebih meningkatkan usahanya agar tidak menjadi beban daerah.

- e. Realisasi Penerimaan sampai bulan Agustus 2011 rata-rata dibawah 70 % kecuali PKB 71,46 % dan BBNKB 83,24%,kami **Fraksi Partai Demokrat** Mohon Penjelasan dari Pemerintah Daerah Kebijakan atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan daerah dalam waktu 2 bulan mendatang sampai akhir tahun 2011 ini.
- 2. Belanja Tidak Langsung semula direncanakan Rp.1.117.210.212.935,- berkurang sebesar Rp.35.106.258.197,14,- Atau (3,14%) sehingga menjadi sebesar Rp.1.152.316.471.132,14,- Pengurang tersebut terjadi pada belanja Pegawai sebesar Rp.34.250.553.000,- Kami **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan kenapa terjadi perhitungan yang keliru tersebut dan kami berpendapat bahwa Menejement Kepegawai pada Pemerintah Daerah masih lemah dan data jumlah pegawai yang tidak jelas oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mempunyai data base kepegawaian yang lengkap dapat dipercaya. Dalam memberikan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah agar selektif dan melakukan perlakuan yang sama terhadap masyarakat dengan tetap mempedomani PERMENDAGRI Nomor.37 tahun 2010, tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2011.
- 3. a. Belanja langsung semula dianggarkan sebesar Rp.1.006.471.448.583,- meningkat sebesar Rp.169.977.153.786,- atau 16,89% sehingga menjadi Rp.1.176.448.602.369,-.

Kami **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan tentang Pendidikan berkarakter yang disediakan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- apakah Pemerintah Daerah telah mensosialisasikan program tersebut dengan mempersiapkan sumber daya guru dalam halmoral, etika, agama,danadatistiadatsertalingkungansekolahuntukmelaksanakan program tersebut.

- b. Lebih 60% penduduk bergerak pada sector Pertanian kami **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan bagaimana kemajuan Program pensejahteraan Petani yang telah ditetapkan pada awaldulu .
- c. Danau Singkarak yang telah dijadikan sebagai tempat pelaksanaan Tour de' Singkarak merupakan event Internasional kami mohon penjelasan SKPD terkait Dinas Parawisata, Dinas Tata Ruang, Prasarana Jalan dan pemukiman serta dinas PSDA untuk menjadikan Danau Singkarak menjadi Objek Wisata yang punya nilai keindahan ,kenyamanan dan mempunyai dayatarik, karena sepanjang jalan pinggir Danau Singkarak sudah dipenuhi bangunan liar.
- d. Ditinjau dari sudut Anggaran Belanja yang telah direalisir sampai Agustus 2011 rata-rata 70% dari anggaran semula tahun 2011 ,dengan adanya Anggaran Perubahan terjadi peningkatan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.35.106.258.197,14,- Atau 4,14% dan Belanja Langsung sebesar Rp.169.977.153.786,- atau 16,89% berarti juga terjadi peningkatan kegiatan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah,

Kami **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan Pemerintah Daerah Kebijakan dan langkah apa yang dilakukan untuk melaksanakannya dengan waktu yang tersedia tinggal 2 bulan sampai akhir Desember 2011. jangan terkesan dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga kualitas pekerjaan terabaikan terutam pekerjaan yang bersifat pisik dan lingkup Pertanian yang memerlukan waktu lebih lama.

Demikianlah beberapa hal menurut pendapat Kami **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Pemandangan Umum untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan bahan bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang akan membahas dalam sidang-sidang komisi-komisi dan Gabungan Komisi secara mendalam untuk kesempurnaannya, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam saran dan pertanyaan kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

BILLAH TAUFIK WALHIDAYAH, WASSALAMMUALAIKUM. WR. WB.

Padang 13 Oktober 2011.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,


H.M.NURNAS. ST

Sekretaris,


H.SUWIRPEN SUIB

Penasehat : IR.YULTEKHNIL.MM.

Wakil Ketua : IR.H.ARKADIUS DT.INTAN BANO.MM.MBA.

Anggota :

1. LISWANDI.SE.
2. HASRANITA.SH.MH.
3. ERNAWATI TANJUNG
4. H.BUZARMAN
5. IR.H.NOVRIL ANAS.
6. H.NOFRIZON
7. HJ.ZAHARA HASNI.
8. H. DODI DELVI SE.
9. ELDI SUTRISNO.DT.INTAN BATUAH.
- 10.DRS.SYAMSUL BACHRI YAHYA DT.LUBUK BANDARO.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

Disampaikan Pada Sidang Paripurna
Kamis, 13 Oktober 2011

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatu;

Alhamdulillah Hirabbila'lamin wassalatu wassala mua'la
asrafilambiai waa'laalihi waashabihi Rasulillahi ajmain,
Asshaduallaillahailallah waashaduannaMuhammad darusullullah
lanabiaba'da,

Yang Kami Hormati:

- Sdr. Gubernur Sumatera Barat
- Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat.
- Sdr. Muspida Provinsi Sumatera Barat
- Ketua Pengadilan Tinggi & Peng. Tinggi Agama Prov. Sum. Barat
- Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
- Sdr. Sekda, Asisten, Ka. Kanwil, Kep.Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat
- Sdr2 kami Pimpinan Parpol, Ketua LKAAM, Bundo Kanduang, Ormas, LSM, dan rekan-rekan kami Wartawan Media Cetak dan Elektronik, serta hadirin walhadirat

Izinkanlah kami mengajak Bapak Ibu Sdr untuk mengucapkan puji beserta syukur kehadiran Illahi Rabbi, dimana atas rahmat, karunia, hidayah dan petunjuk-Nya Alhamdulillah kita dapat hadir bersama di Ruang Sidang DPRD Prov. Sumatera Barat yg terhormat ini, dalam rangka mengikuti Sidang Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Pemandangan umum fraksi terhadap :

"RANPERDA TENTANG RANCANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (RAPBDP) PROP.SUMBAR TAHUN 2011."

Selanjutnya Shalawat beiring salam, marilah kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW atas Suri dan Tauladannya. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang beriman. Amin, “ **Allahumma salli'ala saidina Muhammad Wa'ala ali saidina Muhammad** “.

Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami FRAKSI PARTAI GOLKAR untuk menyampaikan Pemandangan umum Fraksi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah RAPBDP tersebut diatas.

Selanjutnya juga ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Fraksi Partai Golkar DPRD Prov. Sumbar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, untuk berdiri diatas mimbar yang terhormat ini, membacakan Pemandangan Umum ini.

Sdr. Ketua, Sdr. Gubernur dan hadirin yang kami hormati.

Pada hari Selasa yang lalu tanggal 11 Oktober 2011 sudah sama-sama kita ikuti Nota penjelasan dari Gubernur Sumatera Barat tentang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tentang Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2011, dan kita juga telah mempelajari lampiran dari RAPBDP tersebut, yang diserahkan Gubernur ke DPRD.

Kami Fraksi Partai Golkar sangat menyambut baik dari Rancangan RAPBDP Sumatera Barat tahun 2011 yang diajukan Gubernur tersebut, RAPBDP tahun 2011 ini telah dibuat berdasar kebutuhan daerah, dan juga dikarena program yang ditetapkan pad awal APBD yang lalu tidak lagi cocok dilaksanakan dalam tahun berjalan, dan juga program-program yg ditetap juga tidak lagi menguntungkan terhadap kepentingan masyarakat dan daerah.

Maka untuk itu sekaranglah saatnya untuk melakukan penggeseran anggaran dimaksud, baik kegiatan dalam SKPD maupun program antar SKPD, tentunya program yang dapat meng optimalkan pemerintahan daerah. Dan yang tidak kalah pentingnya mungkin ada program program baru yang belum lagi tertampung dalam APBD tahun berjalan.

Saudara Gubernur Yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menyakut dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang RABDP Sumatera Barat tahun 2011 Yang telah Saudara Gubernur ajukan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Saudara gubernur sudah mampu menaikkan pendapatan daerah yang cukup signifikan yakni sebesar 4,26 % sehingga pendapatan tahun 2011 menjadi Rp. 2.071.161.195.841,- yang semula sebesar Rp. 1.986.576.067.525,- terjadi kenaikan sebesar Rp. 84.585.128.316,- sedangkan belanja naik dari alokasi semula Rp. 2.123.681.661.518,- menjadi Rp.2.328.765.073.501,14. Belanja bertambah menjadi sebesar Rp.205.083.441.983,14 (9,66 %).

Dengan demikian terjadi defisit anggaran sebesar Rp.257.603.877.660,14. Defisit ini akan ditutup dengan Silpa tahun 2010 sebesar Rp.335.221.212.133,14. Dan sisanya akan dialokasikan sebesar Rp. 77.817.334.473 untuk pengeluaran pembiayaan.

Dari uraian diatas kami Fraksi partai golkar memberikan Apresiasi yang tinggi kepada gubernur dan wakil gubernur Iwan Prayitno dan Muslim Kasim. Namun demikian jika kita lihat Uraian Pendapatan secara keseluruhan, ada yang perlu menjadi perhatian kita bersama yaitu:

- a. Pada Pengelolaan kekayaan daerah terjadi peningkatan pendapatan sebesar 29,33 %, yaitu dari PT.ATS, PT.Grafika, PT.Dinamika, Bank Nagari dan PT.Askrida sehingga menjadi Rp.80.602.797.176,- yang awalnya Rp.62.321.907.000,-. Peningkatan yang cukup baik dan bagus, akan tetapi tiga perusahaan ATS, Grafika dan Dinamika, terjadi penurunan rencana pendapatan sebesar 81,25 %. Pada Nota Keuangan Gubernur menjelaskan bahwa penurunan pendapatan di PT ATS disebabkan karena penggantian direksi baru, jika direksi baru tersebut profesional tentu yang bersangkutan tidak akan mau menurunkan rencana pendapatannya sedemikian kecil, demikian juga halnya Grafika dengan alasan yang klasik tidak mendapat pekerjaan dan Dinamika hanya untuk menutup hutang. Jika Perusahaan Daerah ini hanya akan dijadikan tempat penampungan orang-orang tertentu dan tidak profesional sebaik Perusahaan Daerah ini ditutup saja karena dari tahun ketahun hanya mengharapkan bantuan APBD, untuk itu mohon penjelasannya.
- b. Menurut sumber yang patut dipercaya adanya isu pemungutan uang retribusi di jembatan Timbang, kepada truk yang bermuatan lebih, apakah ini tidak menjadi pendapatan Daerah, karena rakyat sudah menanggung akibat kebijakan Gubernur untuk pembatasan muatan (Tonase) kepada Truk angkutan barang sehingga harga upah angkutan menjadi naik, yang berimplikasi naiknya beberapa harga barang pokok. Akan tetapi pada praktek Kenderaan angkutan barang tetap mengangkut barang dengan melebihi tonase ini dapat dilihat untuk semen D/O dan barang lain dapat dilihat dari surat jalannya. Untuk itu mohon penjelasannya hingga nantinya isu ini tidak menjadi fitnah.

2. Pada RPJMD yang sudah kita sepakati pada 05 April 2011 yang lalu bahwa Gubernur sudah mentarget kan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, direncanakan pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2015 sebesar 7,46 % dengan PDRB 55,44 triliun.

Dan untuk mendukung target tersebut dalam rangka merealisasikan prioritas pembangunan dimaksud akan dilakukan terobosan seperti;

Reformasi birokrasi, gerakan terpadu pengembangan SDM, pensejahteraan petani, pengembangan UMKMK, pengembangan fakir miskin, satu sapi satu petani, kakao, jagung, dan tuna, subsidi siswa SLTA Miskin dan program Pendidikan berkarakter, disamping itu juga direncanakan pengembangan infra struktur seperti;

Jalan Kereta Api Duku - BIM & Shorcut Jalan Kereta Api Padang Solok, Jalan dua Jalur Padang – Payakumbuh, Sicincin- Malalak- Ngarai Sianok, Jalan Tepi Pantai menuju BIM, Sitinjau Laut, Padang-BayPas, Jalan evakuasi dan escape Building, yang akan direalisasikan dalam kurun waktu lima tahun Pemerintahan Bapak Irwan Prayitno dan Muslim Kasim, sudah sejauh mana rencana tersebut mulai dicicil untuk dilaksanakan mohon penjelasannya apakah dalam RAPBD 2011 ini sudah mulai ditampung.

3. Dan mohon penjelasannya tentang rehabilitasi jalan Sicincin – Malalak, yang sudah empat tahun lebih dilaksanakan dan sudah dua tahun lebih pula dilakukan peresmian pemakaiannya yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur Sumatera Barat, dan kami impormasi yang layak dipercaya akan dilakukan pengalihan trase jalan sebab trase yang lama kondisinya sangat labil dan rawan longsor, jika ini yang terjadi ini adalah kesalahan perencanaan, maka sesuai dengan Undang-undang nomor 18 tahun 1999, jika kegagalan pembangunan disebabkan oleh penyedia jasa/pelaksana, dan perencana maka ancamannya adalah pidana 5 tahun untuk pelaksana dan 10 tahun untuk perencana, untuk itu perlu dilakukan evaluasi yang mendalam.
4. Sumatera Barat mempunyai kawasan kelautan yang sangat luas dan pesisir pantai yang cukup panjang serta diisi oleh pulau besar kecil lebih kurang 185 pulau yang telah diberi nama yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, kepulauan dan pesisir pantai tersebut juga dihuni oleh penduduk warga Sumatera Barat yang rata-rata mengharapkan penghasilan dari hasil kelautan, yang profesinya masing-masing sebagai nelayan, program apa yang sudah dan akan dilakukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan tersebut untuk itu mohon penjelasan.

5. Pada Pos Pendapatan kita mendapatkan Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Tembakau kami Fraksi Golkar menyaran untuk dapat di gunakan dalam pembinaan petani tembakau, guna untuk dapat meningkatkan produksinya karena petani tembakau kita masih bertani secara tradisional dan kebunnya masih berpindah pindah, karena belum ditemukan pupuk yang pas untuk pengembangan tembakau. Untuk itu mohon penjelasannya.
6. Kami Fraksi Partai Golkar sangat mendukung kegiatan pendidikan karakter, namun perlu dilaksanakan dengan baik, dan perencanaan yang matang, dan dengan disiplin anggaran yang benar. Sebab tidak ada satu pun undang-undang yang membenarkan pembelanjaan uang Negara sebelum mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat / DPRD untuk Provinsi dan Kabupaten. Dan selanjutnya jika pendidikan karakter akan kita laksanakan, programkanlah mulai dari pendidikan usia dini PAUD, TK dan sekolah dasar.
7. Dalam Nota Keuangan halaman 38 angka 1 a. kami salin sesuai aslinya; **Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp.566.171.200.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.34.250.553.000, atau 6,04 % sehingga menjadi Rp.532.674.804.330,-** , kami menjadi sulit memahami kalimat dan angka tersebut diatas apa yang menjadi tujuan dan maksud dari saudara Gubernur.
Perhitungan anggaran ini betul betul tidak profesional, yang kami sesuaikan dengan prediksi kami sendiri bahwa anggaran belanja pegawai berlebih 34 miliar lebih, jika hal ini dibiarkan terus, ini bukan akan menyelamatkan masyarakat Sumatera Barat akan tetapi sebaliknya. Yang seharusnya uang yang 34 milyar lebih tersebut seharusnya sudah beredar ditengah-tengah masyarakat dan akan menimbulkan multy player efek yang cukup berjenjang banyak, untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi masyarakat sumatera barat, untuk itu mohon penjelasannya. Dan selanjutnya kami mohon dijelaskan berapa jumlah pegawai sesungguhnya sesuai dengan golongan/kepangkatan serta berapa jumlah jabatan strukturalnya, dan bagaimana cara penggajiannya. Dan bagaimana pula penggajian dengan staf-staf ahli dan staf khusus yang selalu mendampingi pejabat tertentu, karena dikhawatirkan pada akhir perjalananya akan menjadi preseden hukum, mohon penjelasannya.
8. Kami Fraksi partai Golkar sangar mendukung Pembangunan Gedung IPMM Bogor, karena dengan banyaknya pemuda kita yang menuntut ilmu di luar Sumatera Barat, perlu pada daerah-daerah tertentu dibangun Gedung atau asrama yang dapat menampung sementara dari pada anak anak kita, menjelang mereka ber asimilasi dengan daerah baru tersebut, untuk itu kami mohon penjelasan dimana saja Pemerintah daerah yang sudah membangun gedung atau asrama mahasiswa dan bagaimana status kepemilikannya.

9. Pada RAPBDP ini di sediakan penambahan anggaran tahun jamak, yang pada intinya pembangunan infra struk yang dibiayai lebih dari satu tahun anggaran untuk tambahannya sebesar Rp.113.096.364.656,- yang ditempatkan di Dinas Prasjal Pemukiman dan Perumahan dan Dinas PSDA. Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah telah melaksanakan pelengan pekerjaan yang anggarannya tidak cukup tersedia, itu sangat bertentangan dengan Pepres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / jasa, pada Pasal 13 berbunyi bahwa: "**PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas`anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.**" Pada pasal 52 Pepres 54 tahun 2010 dijelaskan Kontrak tahun jamak hanya untuk kegiatan, penanaman benih,/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara makanan dan obat di rumah sakit, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa clening service. Untuk pekerjaan konstruksi tidak diatur untuk tahun jamak, kami ingatkan pada kesempatan ini kontrak-kontrak tahun jamak agar ditinjau kembali supaya dikemudian hari tidak menjadi persoalan hukum dan untuk itu mohon penjelasannya.
10. Pada urusan Pekerjaan Umum awalnya dianggarkan sebesar Rp. 334.486.274.800,- dan pada Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 113.096.364.656,- atau 39,79 % sehingga menjadi sebesar Rp. 467.582.639.506,-. Berkaitan dengan pembangunan di Bidang infrastruktur pada APBD 2011 sesuai dengan kenaikan anggaran tersebut, ada beberapa hal menurut Fraksi Partai Golkar perlu menjadi perhatian Dinas Prasjal dan Tarkim:
- a.Kelanjutan pembangunan pekerjaan infrastruktur yang terbengkalai, dan sudah dilaksanakan sebelum tahun anggaran 2011 seperti jembatan Subang-Subang Kab. Agam, dan Jembatan –jembatan di Kabupaten lainnya yang sama kondisinya. Untuk itu mohon penjelasannya?
 - b.Sudah sejauh mana realisasi pelaksanaan pembangunan abrasi pantai di Kabupaten Pasaman Barat (Air Bangis-Sasak-Maligi), yang anggarannya sudah tersedia sebesar Rp. 15 Milyar, tapi sampai saat ini belum terlaksana, dan saat ini kita sudah dipenghujung tahun anggaran untuk itu Mohon penjelasannya?
 - c.Berkaitan juga tentang peningkatan dan perbaikan jalan dan jembatan nasional seperti jembatan BATANG HALUAN/ Batang Biluan -Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, yang posisinya berada di pusat kota dan pusat keramaian, sampai hari ini belum dimulai pengerjaannya sehingga masyarakat harus meliwati jembatan darurat yang sempit hanya untuk satu kendaraan dan sangat mengganggu arus lalu lintas, seperti mobil CPO minyak

kelapa sawit, mobil truk Fuso yang membawa tonggak listrik PLN, dan lain-lainnya tidak bisa melewati, sehingga secara ekonomi merugikan masyarakat dan mengganggu kelancaran proses pembangunan. Untuk itu Mohon penjelasannya?

Saudara Gubernur Yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sebutkan diatas, kami Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat sebelumnya memohon maaf jika dalam penyampaian tidak pada tempatnya, ini tidak lain hanya karena didorong oleh keinginan yang luhur guna untuk mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat , bak kato urang pandai;

Tasidoroang jajak manurun, tatukiek jajak mandaki adat jo syara'k kok tasusun, bumi sanang padi manjadi.

Gantang di bodi caniago, cupak dijadikan kasukatan. Adat mamakai syara'k mangato ujuik satu balain jalan.

Indak bingkudu tak bagatah, antah kok birah jo kaladi. Indak Pangulu nan Tak Gawa anta kok Allah dengan Nabi.

Tuhan Allah basifaik qadim manusia basifaik khilaf, salah kaTuhan mintak Tobaik salah kamanusia minta maaf, tasingguang dek kanaik talantuang dek katurun , ampun jo maaf kami dibari.

Demikianlah Pemandangan Umum ini disampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

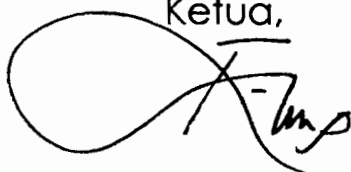
Wabillahittaufiq Walhidayah

وَلَسْكَ اَلْمُرْعَلِيْمُوْرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 13 Oktober 2011

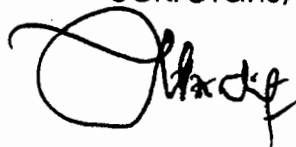
**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



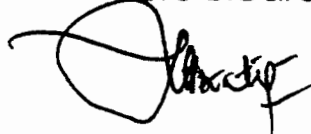
Drs. ASRIL KASUMA

Sekretaris,



DRA. SITI IZZATI AZIZ

Juru Bicara



DRA. SITI IZZATI AZIZ



FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANPERDA PERUBAHAN APBD 2011**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat

Senin, 13 Oktober 2011

Juru Bicara :**ISMA RINI**.....

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang Terhormat :

Sdr. Gubernur Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Prov. Sumatera Barat.

Sdr. Sekretaris Daerah / Asisten / Kepala Badan / Dinas / Kantor Pemprov.

Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Se-Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP.

Serta Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam rangka mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2011.

Selanjutnya Shalawat dan Salam marilah kita aturkan pula pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita pada pintu gerbang Hidayah, kemakmuran dan kemajuan bagi umat dengan mempedomani dua pusaka yakni Al-Qur'an & Sunnah kita sebagai tuntunan untuk mencapai kehidupan yang bahagia didunia dan akhirat.

Kemudian izinkanlah kami Fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra Tahun 2011.

Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada Panitia Anggaran bersama-sama dengan TAPD serta Komisi-komisi yang telah bersusah payah dalam pembahasan yang telah menyita banyak waktu, tenaga dan pikiran. Semoga hasil dari semua jerih payah tersebut mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin....

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

Kami menyadari bahwa proses yang akan dilalui untuk sampai kepada penetapan menjadi Peraturan Daerah Tetang Perubahan APBD Tahun 2011 ini merupakan satu rangkaian pembahasan yang melelahkan, mengingat padatnya

Partai Gerindra sekali lagi mengharapkan agar kelebihan dana tersebut juga disalurkan pada ormas dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, agar mereka juga bisa menghidupkan organisasi dan mencapai cita-cita organisasinya ini. disamping banyak komponen pendukung kegiatan disekitar kita sendiri selama ini yang juga kurang mendapat perhatian yang layak.

Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2011. Kami berharap semua yang kami sampaikan diatas dapat dipenuhi, maka sembari mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra semoga bermanfaat adanya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan.

Wabillahitaufik wal hidayah

وَلَسْلاَمٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Salam Indonesia Raya !!!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Wakil Ketua


ZULKIFLI JAILANI,SH



Sekretaris


ISMARNI

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TERHADAP

**PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN 2011**

Disampaikan Oleh : Indra Dt. Rajo Lelo, SH.MM

Pada hari : KAMIS / 13 Oktober 2011



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL



TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2011

Disampaikan Oleh: INDRA DT. RAJO LELO, SH.MM

Padang; Kamis, 13 Oktober 2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat ;
- Yth . Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ;
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat ;
- Yth , BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Muspida Provinsi Sumatera Barat ;
- Yth. Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Kepala Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
- Yth. Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan para Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur yang sedalam-dalamnya terpulang kehariban Allah SWT, atas kehendak dan kekuasaan-Nya kita dapat berhimpun pada ruang ini untuk melaksanakan rapat paripurna dalam memberikan Pemandangan Umum akan nota pengantar yang telah saudara gubernur sampaikan sebagai rangkaian proses pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2011. Salawat salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah untuk mendakwahkan Islam kepada seluruh manusia agar dijadikan pedoman hidup.

Saudara Gubernur dan undangan yang mulia !

Setelah mendengar penyampain Nota Pengantar Saudara Gubernur tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2011 yang telah disampaikan pada hari *Selasa tanggal 11 Oktober 2011*, di mana saudara telah menguraikan secara sederhana perubahan Pendapatan, perubahan Belanja dan perubahan Pembiayaan. Selanjutnya saudara menjelaskan perubahan itu disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, penyesuaian pendapatan daerah yang meliputi redistribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah, penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2010 yang ditargetkan pada APBD Tahun 2011 dengan ditetapkan dalam rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis

belanja, melakukan pemanfaatan sisa tender serta kegiatan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan yang dialokasikan kembali dalam bentuk kegiatan yang sangat mendesak dan dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan

Rencana Perubahan yang saudara sampaikan, yaitu perubahan pendapatan daerah dari Rp. 1.986.576.067.525 (*satu triliun sembilan ratus delapan puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu lima ratus duapuluh lima rupiah*) pada Awal APBD menjadi Rp. 2.025.774.868.773, (*dua triliun duapuluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enampuluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*) kemudian perubahan Belanja saudara proyeksikan dari Rp. 2.123.681.661.518 (*dua triliun seratus duapuluh tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan belas rupiah*) pada APBD awal menjadi Rp. 2.279.596.080.906, (*dua triliun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu sembilan ratus enam rupiah*) perubahan pengeluaran pembiayaan yang semula Rp. 74.479.901.487 (*tujuh puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) menjadi Rp. 81.400.000.000 (*delapan puluh satu milyar empat ratus juta rupiah*).

Saudara Gubernur dan Undangan yang mulia !

Pada Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2011 yang dilaksanakan antara Pemerintahan daerah dengan DPRD tanggal 7 September 2011 lalu telah dilakukan rasionalisasi dan

akselerasi serta akomodasi berbagai hal sehingga angka nota yang saudara antarkan tersebut terjadi pergeseran-pergeseran sehingga terjadi perubahan pendapatan dari **Rp.1.986.574.067.525** (*satu triliun sembilan ratus delapan puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta enam puluh tujuh ribu lima puluh dua lima rupiah*) pada APBD awal menjadi Rp. 2.071.161.195.841 (*Dua triliun tujuh puluh satu milyar seratus enampuluh satu juta seratus sembilanpuluh lima ribu delapan puluh empat satu rupiah*) pada Nota Kesepakatan dan belanja dari Rp. 2.123.681.661.518 (*dua triliun seratus dua puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh delapan belas rupiah*) pada APBD awal menjadi Rp. 2.328.765.073.501 (*dua triliun tiga ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah*) pada Nota Kesepakatan dengan total APBD pada Nota Kesepakatan Pemerintahan daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp. **2.406.382.407.974,14** (***dua triliun empat ratus enam milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah ,empat belas sen***)

Berdasarkan kesepakatan dan pengantar saudara gubernur maka Fraksi PAN menyampaikan pandangan umum dengan sebagai berikut sehingga pembahasan Perubahan APBD Tahun 2011 mendapatkan pengayaan dan pembobotan yang maksimal.

Saudara Gubernur dan Undangan yang mulia !

A. PENDAPATAN DAERAH PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2011

Mohon penjelasan dari saudara gubernur atas kenaikan restribusi pelayanan kesehatan, restribusi pengujian kendaraan

bermotor dan restribusi tera ulang. Terhadap pelayanan kesehatan tersebut, apakah di tetapkan oleh rumah sakit daerah selaras dengan peningkatan pelayanan Rumah sakit terutama rumah sakit daerah yang pertanggungjawabannya kepada pemerintahan daerah Sumatera Barat dan mohon penjelasan apakah pemungutan restribusi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, dan bagaimana dengan penggunaan langsung atas penerimaan restribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 1,38 milyar oleh RS Achmad Mukhtar serta kapan batas waktu pengembalian-nya ke BLUD atau ke kas daerah, dan bagaimana dengan pendapatan kerja sama operasional (PKO) yang ditemukan oleh BPK RI yang tidak sesuai dengan ketentuan, pada RS Achmad Mukhtar, RSUD Solok dan RSUD Pariaman.

Saudara Gubernur dan Undangan yang mulia !

Selanjutnya Fraksi PAN mohon keterangan kepada saudara Gubernur terkait dengan investasi permanen pada PT bank nagari sehubungan dengan bertambahnya hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 25,76%, yang merupakan bagian laba investasi pada tahun anggaran 2011, bagaimana dengan sistem bunga bank, apakah tidak termasuk kekayaan daerah dan sebesar apa bunga bank karena investasi yang setiap tahun anggaran terus dilakukan. Dan kemana pos penganggaran bunga bank tersebut karena hal tersebut merupakan resiko penanaman uang daerah kepada bank daerah.

Pendapatan daerah juga bertambah yang berasal dari Hibah Pemerintahan Daerah Jawa Timur, Hibah dari PT Jasaraharja dan dialer kendaraan bermotor, Fraksi ingin menanyakan kepada

saudara gubernur apakah penggunaan atau pengelolaan Dana Hibah tersebut apakah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana klausul pasal 8 ayat 2 peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2011, bahwa hibah berupa uang sebagaimana ayat 1 diberikan secara langsung kepada penerima hibah yang penggunaannya sesuai dengan NPHD, dan mohon penjelasan rincian dealer kendaraan bermotor yang menambah pendapatan daerah di wilayah provinsi Sumatera Barat.

Saudara Gubernur dan Undangan yang mulia !

Berdasarkan temuan BPK RI untuk tahun anggaran 2010, terdapat yang tidak bermanfaat bernilai sebesar Rp. 5,47 milyar yang telah diterbitkan SK penghapusan atau pelelangannya oleh saudara gubernur yang berada pada empat SKPD, mohon penjelasan saudara Gubernur, bagaimana perkembangan proses penelusurannya yang terdiri dari bangunan gedung, peralatan, mesin dan barang-barang inventaris dan bagaimana kebijakan yang dapat menambah pendapatan untuk tahun anggaran 2011 termasuk pada perubahan APBD tahun 2011 ini. Serta bagaimana batasan waktu penyelesaian yang saudara gubernur berikan kepada pertanggungjawaban atau SKPD yang terkait.

B. BELANJA DAERAH PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2011

Belanja daerah bertambah 7,34 % sebelum nota kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang pada APBD Awal Rp 2.123.681.661.518 (*dua triliun seratus duapuluh tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh delapan belas rupiah*) menjadi Rp.

2.279.596.080.906 (*dua triliun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu sembilan ratus enam rupiah*) atau bertambah Rp. 155.596.419.388 (*seratus limapuluh lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*) yang saudara jelaskan untuk membiayai kegiatan pendidikan berkarakter, peningkatan pelayanan kesehatan pada rumah sakit daerah, rehabilitasi terhadap infrastruktur yang roboh, gedung-gedung pemerintahan, jalan, jembatan dan irigasi, penyelesaian kegiatan tahun jamak. Rata-rata belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kabupaten kota, belanja bantuan keuangan pada kabupaten kota dan belanja tak terduga mengalami kenaikan.

Terkait pendidikan berkarakter Fraksi PAN memberikan dukungan, apabila telah dipersiapkan segala sesuatu untuk realiasinya, maka pada APBD tahun anggaran 2012 sudah dapat diimplementasikan.

Mohon penjelasan terhadap belanja rehab dan rekon akan fasilitas umum, jalan, gedung-gedung pemerintahan dan irigasi, sejauh mana sampai pelaksanaannya, berapa persentase yang telah dilaksanakan dan berapa persentase yang belum dilaksanakan terhadap rehabilitasi akan gedung-gedung pemerintahan, jalan dan irigasi. Dan mohon penjelasan akan relokasi dana gempa terhadap perbaikan permukiman penduduk, bantuan kesejahteraan akan masyarakat yang terkena gempa tahun 2009. Mohon penjelasan dan uraian akan pemberdayaan ekonomi masyarakat, program kesejahteraan petani, pemasaran hasil produksi, rehabilitasi jaringan irigasi, budidaya perikanan, pengolahan produk pasca panen. Masih terkait dengan dana gempa untuk permukiman penduduk masih

tercium aroma dana fiktif terkait penerimaan bantuan tahap 3 (tiga) sehingga menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan pencitraan yang negatif kepada pemerintah.

Mohon penjelasan pengadaan kendaraan oprasionall dukungan pelaksanaan kinerja SKPD sehubungan dengan penghapusan dan pelelangan 156 kendaraan dinas, mohon penjelasan, apakah waktu yang tinggal beberapa bulan ini tepat saatnya untuk pengadaan tersebut atau pelelangan kendaraan tersebut, mohon penjelasan dasar dan landasan yuridisnya. Bagaimana keberadaan dinas yang telah masuk ke daftar penghapusan namun tidak jelas keberadaan fisiknya dan bagaimana bentuk penyelesaiannya

Saudara Gubernur dan undangan yang mulia !

C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN APBD 2011

Pada nota yang saudara sampaikan terjadi penambahan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 6,9 Milyar yang semula pada APBD awal Rp. 74.479.901.487 (*tujuh puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) mejadi Rp. 81.400.000.000 (*delapan puluh satu milyar empat ratus juta rupiah*) untuk penyertaan modal pada PT Askrida dan penambahan Deposito pada PT Rajawali, Fraksi PAN mohon penjelasan, multi palyer efeknya kepada pemerintahan akan investasi kepada PT Rajawali, mohon penjelasan akan perkembangan dampak pembangunannya akan pembayaran serta penyertaan modal kepada PT Askrida

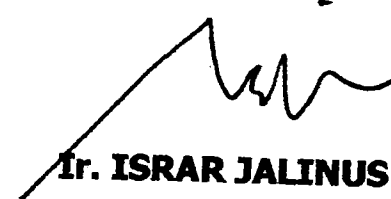


Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Amanat Nasional ini disampaikan jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf, wabillahittaufig walhidayah wassalamu'alaikum wr.wb.

Padang , 13 Oktober 2011

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

KETUA

SEKRETARIS

  
Ir. ISRAR JALINUS **Hj. ARTATI, SH**

JURU BICARA

INDRA DT. RAJO LELO, SH. MM

**PENASEHAT
WK KETUA
BENDAHARA
ANGGOTA**

**H. M. ASLI CHAIDIR
MUZLI M. NUR, S.PD
INDRA DT. RAJO LELO, SH.MM
Hj. LELA PUJANTI**



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(FRAKSI PKS)**
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(FRAKSI PKS)
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Tentang
Rancangan Perubahan APBD Propinsi Sumatera Barat
Tahun 2011**

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

- Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD
Propinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi Serta Pengadilan
Tinggi Agama Sumatera Barat, *Yth. Pimpinan Kantor BPK*
- Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor,
Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas,
LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Hadirat
Illahi Robbi, penguasa dan pengatur alam semesta.

Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada
Junjungan Alam Habibbana Wa Nabiyyana Rosululloh Muhammad
SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada seluruh
umatnya yang selalu setia sampai akhir jaman. Semoga kita semua yang
hadir disini termasuk didalamnya. Amiiin ya robbal alamin.....

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati

Sebelum kami penyampaikan pandangan umum Fraksi terlebih dahulu kami menyampaikan Apresiasi kepada Gubernur yang mendapat dua penghargaan *Pertama* Penghargaan dari Menteri kelautan atas Prestasi dan partisipasi membangun Perbenihan dan Pembibitan ikan di Sumatera Barat. *Kedua* Penghargaan dari Menko Perekonomian “ Investment Award “ (karna terbaik di bidang penanaman modal atau Regional Champion 2011) semoga hal ini bisa mengangkat citra Sumbar di tingkat Nasional.

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati

Pada kesempatan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD tahun 2009 ini perkenalkanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sudah menjadi tradisi pengesahan Perubahan APBD lewat dari batas waktu yang ditentukan, sebagaimana diketahui dalam PP No 58 tahun 2005 pasal 83 (2) disebutkan, “ Selambat-lambatnya pengesahan Perubahan APBD 3 Bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. Hari ini baru akan membahasnya, implikasi dari keterlambatan pengesahan perubahan APBD adalah :
 - a. Terkesan kurang seriusnya pemerintahan propinsi Sumbar (Pemda dan DPRD) terhadap agenda pembangunan Daerah, sehingga tidak bisa bekerja tepat waktu sesuai ketentuan.

- b. Sudah pasti tidak ada program dan kegiatan yang menyangkut pembangunan infra struktur, kegiatan ini sangat penting selain kegiatan tersebut bermanfaat bagi banyak pihak juga menyedot tenaga kerja dan menggeliatkan ekonomi masyarakat.
 - c. Sangat tidak efektif, karena dengan terlambatnya pengesahan perubahan APBD ini terkesan hanya untuk legitimasi pencairan dana hibah dan bantuan social. Maka dari itu dengan keterlambatan ini Fraksi PKS menyarankan pembahasan nantinya baik TAPD maupun Banggar DPRD dapat bekerja focus dan efesien terhadap waktu sehingga Rencana Perubahan APBD dapat segera disahkan.
2. Mengingat APBD maupun perubahan APBD merupakan implementasi dari RPJMD ataupun Visi / Misi Gubernur, sudah selayaknya anggaran juga mencerminkan focus kerja Gubenur dalam mencapai Visi / Misinya. Dalam Perubahan APBD kali ini Fraksi PKS melihat belum mencerminkan Visi/Misi Gubernur karena trend kenaikan anggaran masing-masing urusan ataupun sector cenderung sama, sudah selayaknya sector-sektor ataupun urusan yang secara langsung menjadi Leading Sector terhadap pencapaian Visi/Misi Gubenur harus mendapatkan alokasi anggaran lebih, minsalnya urusan pertanian (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan peternakan) yang secara langsung mendukung program GPP dan SPSS dan urusan pendidikan mesti mendapat tambahan anggaran yang lebih dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan, mohon penjelasan.

3. Sebagaiman disebutkan dalam Nota Pengantar bahwa penerimaan pajak daerah terutama PKB dan BBNKB terus mengalami kenaikan sampai dengan Agustus 2011, Fakta di lapangan memang membuktikan pertumbuhan kendaraan cukup besar. Khusus Pajak dari PKB dan BBNKB bagaiman trend pertumbuhan 3 tahun terakhir ini, apakah peningkatan pendapatan tersebut sudah mencerminkan data riil sesungguhnya pertumbuhan kendaraan bermotor di sumbar? Mohon penjelasan
4. Dengan terus membengkaknya anggaran yang dialokasikan untuk hibah dan bantuan sosial, Fraksi PKS menyarankan untuk alokasi anggaran tersebut agar lebih selektif, tepat sasaran. Dan Bagaiman Gubernur mengantisipasi agar kedua alokasi anggaran tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. ?
5. Banyaknya kritikan dari berbagai pihak terhadap Pemprov yang dianggap kurang perhatian terhadap warga miskin yang tidak bisa sekolah atau melanjutkan kuliah, disisi lain kita punya dana lebih kurang Rp 26 M yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut, Fraksi PKS mohon penjelasan bagaimana kondisi dan kesiapan Yayasan Pendidikan Mingkabau sampai hari ini untuk menyalurkan beasiswa dari dana tersebut untuk warga miskin.

6. Sangat disayangkan dalam KUA PPAS-P 2011 anggaran untuk persiapan pendidikan karakter belum dapat teranggarkan, padahal program tersebut adalah program yang digulirkan secara nasional yang seyogyanya mendapat perhatian lebih dari kita semua, ~~kami fraksi PKS mohon penjelasan apakah untuk pendidikan karakter ini sudah tersedia anggaran dari APBD~~ Kami juga berharap kiranya pemerintah daerah perlu menjelaskan lebih jelas lagi konsep pendidikan karakter tersebut agar semua pihak dapat mendukung program ini.
7. Berkaitan dengan recoveri pasca gempa yang membutuhkan dana yang besar, Fraksi PKS meminta kepada pemerintah daerah untuk pro aktif melakukan lobby ke pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini bisa dimanfaatkan juga ketika pejabat pemerintah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri atau kegiatan lain yang bersifat internasional. Untuk itu perlu kiranya pemerintah daerah melengkapi dengan film documenter yang berkaitan dengan kegiatan gempa atau bencana di sumbar. Kepedulian masyarakat terhadap bencana sumbar masih tinggi, ini bisa terlihat pada perubahan APBD ini masih ada bantuan korban bencana sebesar Rp. 441.047.382,-.
8. Berkaitan dengan sumbangan dari pihak ketiga khususnya dari PT semen Padang. Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena sudah adanya komitmen dari PT Semen Padang untuk meningkatkan sumbangannya kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Kami berharap peningkatan sumbangan tersebut sudah harus

dimulai pada tahun 2012 ini dengan nominal yang tentu tidak mengecewakan kita semua.

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS agar dapat dijadikan bahan dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya semoga Allah senantiasa meridhoi langkah kita amien.


Wabillahirrahmatil walhidayah


Wassalamualaikum,wr,wb.

Padang, 13 Oktober 2011
13 Dzulqo'dah 1432 H

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS)
DPRD Sumatera Barat




Rafdinal. SH
Ketua


Sultani, SPt, MSi
Sekretaris


Sultani, SPt, MSi
Juru Bicara

J. bue

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI**



**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

Kamis, 13 Oktober 2011

1 Krs
2 Assala

3

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

4 YTH. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat

YTH. Saudara Ketua dan Wakil Ketua beserta Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Barat.

YTH. Saudara Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat

YTH. Saudara Sekda, Asisten, Kepala Dinas/Badan dan
Kantor dalam Lingkungan Pemda Provinsi Sumatera
Barat

YTH. Saudara Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-
rekan wartawan ^{baik maupun} media cetak, elektronik, multi-media
beserta Hadirin dan hadirat yang kami muliakan. *tdh*

*Dapat saya sebutkan satu peraturan
namun tdk mengurangi rasa penghormatan
saya.*

~~Alhamdulillahirobbilamin~~

✓ Kita puji

Puji syukur hanya ke hadirat Allah, SWT karena atas rahmat dan karuniaNya kita masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga dapat hadir dalam Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2011.

kita

Syalawat salam marilah sama-sama hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk menyampaikan Padangan Umum ini.

Saudara Gubernur, Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan

Berangkat dari hasil kesepakatan bersama terhadap Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2011 pada 7 Oktober 2011 dan setelah mencermati dan memahami Nota Pengantar yang disampaikan Sdr Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2011 pada 11 Oktober 2011 lalu.

Maka perkenankanlah kami menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:

1. Bahwa secara hukum, sosial dan moral, sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan anggaran pendapatan dan belanja yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan. Untuk itu sangat dituntut upaya pengelolaan APBD yang terencana baik, sehingga pelaksanaan dan penyerapan APBD berjalan maupun perubahannya ^{berjalan} sebagaimana diharapkan.?

Bagaimana Realisasinya

2. Bahwa pada prinsipnya, APBD maupun Perubahannya harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, ^{yang menyinkron} yakni alokasi, distribusi, dan stabilitas. Fungsi alokasi dimaksudkan agar APBD maupun Perubahannya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik makin baik. Fungsi distribusi dimaksudkan agar APBD maupun Perubahannya didistribusikan merata sehingga pendapatan dan pengentasan masyarakat miskin

benar-benar menjadi sasarannya. Selanjutnya fungsi stabilitas ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. *Bagaimana realisasinya?*

3. Fraksi Perjuangan Reformasi mengapresiasi yang besar terhadap upaya-upaya Pemerintah Daerah atas adanya peningkatan Pendapatan Daerah, yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maupun Alokasi Dana Perimbangan serta Pendapatan Lain-lain yang Sah). Peningkatan ini terjadi menurut hemat kami tidak lepas dari upaya dan kerja keras kita bersama untuk terus menggali potensi-potensi pendapatan daerah. Tentunya kita berharap peningkatan ini terus terjadi pada tahun-tahun anggaran selanjutnya. Sebab sesungguhnya masih terdapat potensi-potensi pendapatan yang masih ^{sepatu dikelola} ~~digarap~~ lebih optimal lagi. Misalnya pendapatan dari laba penyertaan modal pada beberapa BUMD seperti PT ATS, PT Grafika dan PT Dinamika yang saat ini masih belum ^{seimbang} ~~memadai~~ dibandingkan nilai penyertaan modal yang

di alokasikan

~~disuntikkan~~ kepada BUMD tersebut. / Begitu juga dengan peningkatan. *mohon pengelasan*

4. Terkait dengan pendapatan hibah yang bersumber dari BUMN-BUMN yang beroperasi dan memanfaatkan potensi alam Sumatera Barat seperti PT Semen Padang misalnya. Kami berharap agar Pemerintah Provinsi melakukan **terobosan hukum dan kajian serta negosiasi ulang terhadap besaran bantuan hibah yang layak dan pantas untuk daerah**. Kami merasakan nilai hibah Rp10 per zak semen atau sebesar Rp1,5 miliar per tahun dari PT Semen Padang saat ini **sungguh tidak layak dan pantas** bila dibandingkan besaran pemanfaatan potensi alam daerah ^{*yg rusak*} dan dampak kerusakan infrastruktur serta dampak lingkungan yang ditimbulkan PT Semen Padang. **Bila PT Semen Padang tidak bersedia berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan Sumatera Barat ini, kami mendesak Pemerintah Provinsi untuk bersikap tegas dengan menolak bantuan PT Semen Padang yang tidak seberapa tersebut.**

5. Terkait dengan peningkatan alokasi anggaran pada kelompok Belanja Tidak Langsung terutama pada Belanja Hibah dimana kenaikannya mencapai 30,22% dari anggaran semula menjadi Rp.43.467.000.000 dan Belanja Bantuan Sosial naik 51,03% menjadi Rp95, 477 miliar lebih. Kenaikan ini kami nilai cukup besar. Untuk itu, kami berharap kiranya betul-betul dialokasikan sesuai peruntukannya dengan tetap mengedepankan azas akuntabilitas, transparan, adil dan bermanfaat, terutama pemberian dan pemanfaatan Belanja Hibah yang bakal dikelola oleh Yayasan Pendidikan Minangkabau. Selain itu, belanja Bantuan Sosial untuk mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir. Menurut hemat kami, kiranya kurang ^{banyak} ~~elok~~ bila sasarannya hanya mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir saja. Akan elok dan tidak mengusik rasa keadilan kiranya bila bantuan sosial ini juga diperuntukkan bagi mahasiswa Sumatera Barat yang berasal dari keluarga kurang mampu namun beprestasi yang sedang kuliah di perguruan tinggi ternama, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. *mohon pengeloaan ?*

6. Selanjutnya, dengan ketersediaan waktu tahun anggaran 2011 yang tersisa dua bulan lagi, kami meminta agar setiap SKPD lebih optimal dan lebih bekerja lebih keras lagi dalam meningkatkan progres kerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan sehingga serapan anggaran dan realisasinya dapat tercapai sesuai harapan. Salah satunya dengan cara melakukan peningkatan pengawasan dan menerapkan aturan dan ketentuan yang berlaku secara tegas ✓ tanpa memandang bentuk sisir rambutnya agar kualitas dan bobot pekerjaan dapat tercapai sesuai perencanaan. Sebab, kinerja penyerapan anggaran ini merupakan salah satu indikator apakah Pemerintah Daerah serius dan sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah rakyatnya atau tidak.

Pimpinan Sidang dan para hadirin yang kami mulakan

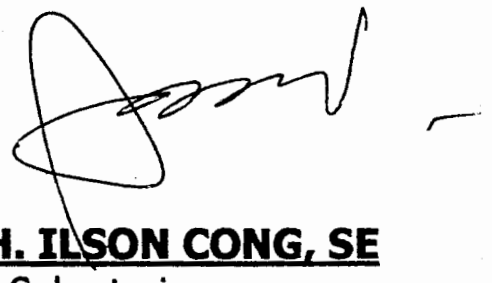
Mengingat ketersediaan waktu yang ~~tidak begitu lapang~~. Fraksi Perjuangan Reformasi berharap Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD 2011 ini **DAPAT SEGERA DITERUSKAN** pada pembahasan lebih lanjut.

Demikianlah Pandangan Umum ini kami sampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan maupun kata yang kurang pada tempatnya karena niat kita sama yakni ***demi terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat***. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROPINSI SUMATERA BARAT**



AGUS SUSANTO
Ketua



H. ILSON CONG, SE
Sekretaris

Anggota

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Rizanto Algamar | (Wakil Ketua) |
| 2. Syahrial, B.Sc | (Bendahara) |
| 3. Ir. Bachtul | (Anggota) |